

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan nasional yang multidimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai tingkat desa. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasar Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 18 Desember 2013 (sumber: pnpm-suport.org) memberikan tuntutan kesiapan pemerintahan desa yang cakap dan tangguh guna menyongsong implementasi Undang-Undang Desa terbaru tersebut.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tersebut terdiri dari 16 bab dan 122 pasal serta bagian penjelasan ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Dalam implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pemerintahan desa dituntut untuk mampu mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dengan prioritas peningkatan kemampuan.

Pertama pelayanan publik, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia guna menciptakan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik yang dibutuhkan seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana.

Kedua kemampuan menyiapkan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, hal ini terkait pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan melalui rencana-rencana strategis guna meningkatkan dan mengembangkan ekonomi desa melalui program-program ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Ketiga kemampuan pengelolaan anggaran desa, terkait kapasitas perangkat desa dalam kemampuan mengelola pemerintahan desa dengan jumlah dana yang cukup besar, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Keempat pengelolaan kelestarian lingkungan hidup, terkait kemampuan perangkat desa untuk melakukan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup guna mencegah terjadinya kerusakan potensi sumber daya alam yang berada di desa.

Dari tuntutan tersebut diatas hal yang mendasar dan penting yang harus mampu dilaksanakan oleh pemerintahan desa adalah kemampuan

pengelolaan anggaran dengan jumlah dana yang relatif besar yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintahan desa perlu memiliki kesiapan yang matang dalam menyongsong implementasi tugas, wewenang, hak, tanggungjawab dan kewajiban dalam pengelolaan anggaran berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014.

Berkaitan dengan pengelolaan anggaran dengan dana yang relatif besar pemerintahan desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dana tersebut. Dalam pengelolaan anggaran tersebut diperlukan kesiapan pemerintahan desa dalam menyongsong implementasinya, yaitu keseluruhan kondisi seseorang atau individu dalam hal ini pemerintahan desa untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemerintahan desa sesuai dengan porsi masing-masing berdasar pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana kesiapan tersebut memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan.

Desa Cekok merupakan desa yang berada di wilayah yang berdekatan dengan pusat kota, dilihat dari segi sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa Cekok sebagai penggerak pemerintahan bisa dikatakan mempunyai sumber daya manusia yang tinggi, aparatur pemerintahan desa di desa Cekok mayoritas berpendidikan sarjana dan SLTA.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Kesiapan Pemerintahan Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi terkait Pengelolaan Anggaran Desa).**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kesiapan pemerintahan desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam menyongsong implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa studi terkait pengelolaan anggaran. Untuk mengetahui persoalan kesiapan pengelolaan anggaran tersebut dapat diverifikasi ke dalam sub pembahasan sebagai berikut:

- 1.2.1 Sejauh mana pemahaman aparatur pemerintahan Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo terkait pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?
- 1.2.2 Bagaimana kesiapan aparatur pemerintahan Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo terkait kesiapan dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?
- 1.2.3 Kendala apa yang di hadapi oleh aparatur pemerintahan Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo terkait kesiapan dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah Untuk mengetahui kesiapan aparatur pemerintahan Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan anggaran desa berdasar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang kemudian lebih diverifikasi kedalam sub-pembahasan sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemahaman aparatur pemerintahan Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesiapan aparatur pemerintahan Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- 1.3.3 Untuk mengetahui permasalahan yang di hadapi oleh aparatur pemerintahan Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo terkait kesiapan dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Bagi peneliti

- 1.4.1.1 Untuk mengetahui pemahaman aparatur pemerintahan desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam dalam pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1.4.1.2 Untuk mengetahui kesiapan aparatur pemerintahan desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam implementasi pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1.4.1.3 Menambah pengetahuan dan informasi baru bagi peneliti terkait permasalahan yang dihadapi aparatur pemerintahan desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam kesiapan implementasi pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1.4.2 Bagi Mahasiswa

1.4.2.1 Guna menjadi referensi terkait kesiapan aparatur pemerintahan desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam kesiapan pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1.4.2.2 Guna memberikan kesempatan bagi peneliti lanjutan untuk bidang yang sejenis

1.4.3 Bagi Masyarakat

1.4.3.1 Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait kesiapan pemerintahan desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam implementasi pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1.4.3.2 Memberikan informasi kepada masyarakat terkait kesiapan aparatur pemerintahan desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

1.4.4 Bagi Pemerintahan Desa

1.4.4.1 Menambah legitimasi terkait kesiapan aparatur pemerintahan desa Cekok

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam implementasi pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

1.4.4.2 Guna bahan evaluasi terkait kesiapan aparatur pemerintahan desa dalam

implementasi tugas pengelolaan anggaran desa berdasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa